

**DINAMIKA KEBIJAKAN ANGGARAN PUBLIK:  
KONFIGURASI DAN DAMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN DI DAERAH\***  
Oleh : Dr. Dyah Mutiarin, M.Si.  
Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Pendahuluan**

*Apakah Indonesia telah memiliki kebijakan anggaran publik yang berpihak pada publik ?*

*Apakah masyarakat telah mendapat manfaat dari anggaran publik dan pembangunan selama ini?*

Anggaran publik memiliki makna strategis bagi masyarakat, tak terkecuali perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, perguruan tinggi memiliki kewajiban moral untuk menyiapkan generasi penerus yang professional, jujur, dan peka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dua pertanyaan diatas menjadi penting ketika kita menyadari bahwa generasi yang dicetak setelah lulus dari perguruan tinggi, akan terjun ke masyarakat yang secara langsung ataupun tidak langsung akan terkait dengan anggaran publik perlu memiliki sikap kritis terhadap anggaran publik. Diantara success story anggaran publik yang telah dirangkai pemerintah seperti keberhasilan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi, memperbaiki pelayanan publik, ternyata disisi lain, pemerintah tidak lepas dari banyaknya masalah yang membelit anggaran publik itu sendiri.

Anggaran publik masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) yang berada pada level Pusat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada pada level daerah sama-sama mengalami banyak persoalan. Kontribusi anggaran terhadap pembangunan, epektifitas anggaran, korupsi anggaran dan dampak anggaran terhadap pengurangan kemiskinan menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan oleh Pemerintah.

Masyarakat tentu berharap bahwa anggaran yang dilaksanakan dalam bentuk APBN maupun APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari sisi belanja, kualitas belanja negara

---

\* Makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah di Universitas Tri Dharma Kalimantan Timur, 15 September 2012.

semakin menurun. Porsi APBN untuk belanja pegawai semakin besar, sementara untuk belanja modal justru sangat terbatas. Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Bantuan Sosial menjadi refleksi Pemerintah memahami kebutuhan anggaran masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa Belanja Pegawai dalam RAPBN 2013 diusulkan lebih besar dari Belanja Modal dan Bantuan Sosial. Belanja Pegawai menyerap 21,2 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat sebesar 1.139,0 trilyun rupiah, dan menempati urutan kedua setelah Subsidi sebesar 316.097,5 trilyun rupiah.

Data lain adalah alokasi anggaran untuk fungsi-fungsi pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan layanan ekonomi hanya 3,9% dari GDP untuk tahun 2010. Nilai tersebut jauh di bawah hasil survei UNPAN untuk negara-negara berkembang lainnya sebesar 14,5% dan alokasi pada negara yang sudah maju yaitu sebesar 25,1% .

Dari sisi peran APBN dalam upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat juga semakin menurun akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6.5% dalam APBN 2011 dan 2012 justru diikuti dengan kenaikan indeks gini menjadi 0,41. Data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Indeks gini pada 2010 adalah 0,38 dan pada Maret 2011 naik menjadi 0,41 atau tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam kurun delapan tahun terakhir, indeks terendah dicapai pada 2004 yaitu 0,33 (<http://www.analisadaily.com>). Amartya Sen (1997) menyatakan bahwa Indeks gini adalah alat untuk mengukur tingkat penyebaran kekayaan di suatu negara dengan menggunakan angka 0 sampai 1. Angka 1 menunjuk pada ketidasetaraan ekstrim sementara 0 menunjukkan sebaliknya. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dinilai berkualitas jika diikuti dengan menurunnya indeks gini karena produk domestik bruto di suatu negara dinikmati oleh semakin banyak warga, demikian pula sebaliknya.

Dengan masih banyaknya masalah yang membelit anggaran tersebut, maka diperlukan telaah dan solusi yang komprehensif terhadap kebijakan anggaran publik tersebut.

## 2. Dinamika Kebijakan Anggaran

Anggaran merupakan inti dari keuangan Negara atau publik finance. Publik Finance atau Keuangan Publik menurut Aronson (1985) adalah : *“the financial activities of government and public authorities, and it describes and analyzes the expenditures of government and the techniques used by governments to finance this expenditures”*. Secara umum tujuan umum sebuah anggaran adalah memberikan informasi tentang rencana keuangan dan hal-hal yang ingin dicapai melalui anggaran. Selanjutnya untuk merumuskan anggaran dilakukan melalui sebuah proses penganggaran yang lebih berorientasi pada tujuan kebijakan anggaran, pengukuran anggaran dan besaran jumlah yang diperlukan untuk sebuah anggaran. Secara sederhana ada tiga pertanyaan sederhana yang perlu diakomodasi oleh anggaran yaitu : ‘Apa yang ingin dicapai oleh suatu anggaran? Apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan suatu anggaran? Berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu?’

*Selanjutnya Knaap menyebutkan bahwa ukuran keberhasilan anggaran adalah pada “ the quantity, quality, and costs of products and services or output produced by government or government services in order to achieve certain effects, and; the intended effects of those measures or outcome.* Dikatakan bahwa keberhasilan anggaran diukur dari kuantitas, kualitas, dan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah produk atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan ditujukan untuk mencapai dampak yang diharapkan dari kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut.

Mardiasmo (2005:62-63) menyebutkan alasan pentingnya anggaran sector publik yaitu:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah

bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Dengan demikian anggaran dapat dijadikan salah satu instrumen untuk memahami dinamika kebijakan publik. Sistem penganggaran dan prioritas pendanaan pembangunan yang terdapat di dalam anggaran publik merefleksikan seberapa besar komitmen Pemerintah terhadap rakyatnya. Secara teoretis, Jones (1984) menguraikan bahwa penganggaran merupakan salah satu titik strategis di dalam proses perumusan kebijakan. Rubin (2000) mengatakan bahwa anggaran mencerminkan pilihan kebijakan dan sekaligus prioritas dalam organisasi publik, "*budgets reflect choices and priorities*". Dalam literatur kontemporer tentang kebijakan publik, juga banyak diuraikan bahwa alokasi dana dalam anggaran publik merupakan cara yang penting untuk melihat substansi rumusan kebijakan di sebuah negara (Sabatier, 2007).

Secara normatif, konfigurasi anggaran banyak ditentukan oleh desain kebijakan fiskal yang dianut oleh pemerintah. Musgrave and Musgrave (1989:6) menyebutkan ada tiga pokok fungsi fiskal sebagai berikut:

1. Fungsi alokasi; meliputi penyediaan barang-barang publik, suatu proses untuk membagi penggunaan seluruh sumberdaya ke dalam barang privat dan barang sosial. Kebijakan pengaturan tidak termasuk di sini karena kebijakan semacam itu tidak termasuk dalam kebijakan penganggaran.
2. Fungsi distribusi; penyesuaian distribusi pendapatan dan kemakmuran untuk menjamin bahwa keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan atau pemerataan dapat terpenuhi.
3. Fungsi stabilisasi; yaitu penggunaan kebijakan penganggaran sebagai sarana untuk menjamin pengerahan tenaga-kerja secara optimal, stabilitas harga yang memadai, serta pertumbuhan ekonomi yang baik, yang akan berpengaruh.

Perkembangan kebijakan fiskal di Indonesia dapat telaah dari model kebijakan fiskal yang termuat dalam Nota keuangan dan RAPBN. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2010 misalnya, dijelaskan kebijakan fiskal mempunyai

tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Peranan belanja Pemerintah Pusat terkait fungsi alokasi dilakukan melalui pendanaan untuk berbagai program dan kegiatan investasi produktif, seperti belanja untuk penyediaan berbagai infrastruktur, maupun untuk membiayai berbagai pengeluaran atau belanja barang dan jasa (konsumsi) pemerintah dalam mendorong permintaan agregat.

Selanjutnya, peranan terkait fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan untuk pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, kurang beruntung atau berkemampuan ekonomi terbatas. Dukungan tersebut diberikan dalam berbagai bentuk pembayaran transfer baik berupa bantuan langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH), alokasi anggaran bagi program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha, seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), maupun berbagai program perluasan kesempatan memperoleh pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan seperti bantuan operasional sekolah (BOS) dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Selanjutnya, peranan terkait fungsi stabilisasi dilakukan melalui penyediaan berbagai jenis subsidi, baik subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok (*price subsidies*), maupun subsidi langsung ke objek sasaran (*targeted subsidies*). Peranan ini sangat penting untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Disisi lain, belanja Pemerintah Pusat juga dapat berperan sebagai stabilisator bagi perekonomian atau menjadi kebijakan *countercyclical* yang efektif dalam meredam siklus bisnis atau gejolak ekonomi.

Dalam anggaran publik, konfigurasi kebijakan anggaran dapat dilihat dari 3 aspek penting anggaran yaitu Pendapatan Negara, Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran. Keterkaitan antara Pendapatan Negara, Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran dengan fungsi fiskal memiliki korelasi

yang kuat dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kualitas kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat, menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam kebijakan fiskal, proses politik anggaran direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan melalui proses yang transparan, dan prosedur yang relatif panjang, dan harus melibatkan peran dan persetujuan berbagai pihak. Kunci keberhasilan kebijakan fiskal terletak pada pemahaman bersama akan pentingnya perencanaan yang baik, pelaksanaan yang efektif, dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal yang akuntabel dari seluruh aparat yang terkait, dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan fiskal.

### **3. Dampak Anggaran Terhadap Pembangunan Nasional Dan Daerah**

Meskipun sistem penganggaran saat ini relatif terbuka dan pemerintah sejak tahun 2002 telah mencanangkan pengembangan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), substansi anggaran ternyata justru belum menyentuh kebutuhan pembangunan yang paling mendasar bagi rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan, layanan sosial dan peningkatan kemakmuran secara merata. APBN masih belum mampu mengatasi masalah klasik kemiskinan, yang sampai sekarang masih terjadi di Indonesia.

Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan dengan pembuatan kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini sangat terkait dengan kebijakan ekonomi makro dan memiliki sasaran yang mampu menjawab tantangan pokok yang dihadapi seperti mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Namun pada Maret 2010 tingkat kemiskinan masih tercatat 13,33% dan pada Maret 2011 berkisar 12,49%. Jumlah penduduk miskin berkurang 1 juta orang dalam setahun yakni dari 31,02 juta orang pada Maret 2010 menjadi 30,02 juta orang pada Maret 2011.

Tingkat kemiskinan terbesar di Maluku dan Papua yaitu sebesar 25,95% dari jumlah penduduk kedua pulau tersebut. Sementara tingkat

kemiskinan terendah di pulau Kalimantan yaitu sebesar 6,92%. Sebagian besar penduduk miskin berada di Jawa (16,73 juta orang) sedangkan jumlah penduduk miskin terkecil berada di Kalimantan (0,97 juta orang) (Sumber: Tinjauan Ekonomi Keuangan edisi Juli 2011).

Rendahnya penurunan kemiskinan kurang berkorelasi dengan anggaran yang dialokasikan untuk pengurangan kemiskinan terutama melalui pos Bantuan Sosial. Bantuan sosial selama ini disalurkan dalam bentuk (a) program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri); (b) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (c) Beasiswa untuk siswa/mahasiswa miskin; (d) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); dan (e) Program Keluarga Harapan (PKH). Besaran yang dialokasikan ketika tahun 2007 adalah 48, 86 trilyun rupiah, dan RAPBN 2013 diusulkan 55,039 trilyun rupiah yang disalurkan melalui Kementerian dan Lembaga ditingkat Pusat. Kurang efektifnya anggaran ini dapat dilihat dari banyak sebab diantaranya karena tidak tepatnya sasaran program, model program pengurangan kemiskinan yang didesain by project, dan kurang menekankan pada upaya keberlanjutan program pengurangan kemiskinan.

Kelemahan kebijakan anggaran juga dilihat pada belum konsistennya prioritas pembangunan dengan peruntukan dana yang dialokasikan. Sasaran utama pembangunan nasional 2010- 2014 yang akan dicapai pada tahun 2013 meliputi: (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,8—7,2 persen, pengangguran terbuka menurun menjadi 5,8—6,1 persen, dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5—10,5 persen; (2) Dalam rangka pembangunan demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68—70; dan (3) Dalam rangka pembangunan hukum, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0.

Bila dirujuk dengan alokasi belanja dalam APBN yang ada dapat diketahui bahwa alokasi anggaran untuk belanja modal dan bantuan sosial masih minim. Belanja Pemerintah Pusat dalam periode 2007—2012, didominasi oleh Belanja Pegawai dan Subsidi. Dalam APBN-P 2012 Belanja Pegawai mencapai 2,5 persen terhadap PDB. Besarnya alokasi dana justru bukan pada Belanja Modal dan Bantuan Sosial yang seharusnya menjadi prioritas anggaran menunjukkan bahwa prioritas pemerintah terhadap kepentingan publik masih lemah.

Selanjutnya, korupsi juga membelit anggaran dari sisi pendapatan. Kebocoran uang negara yang diakibatkan oleh kejahatan perpajakan, setiap tahun ada sekitar Rp 300 triliun pajak tidak masuk ke kas negara (ICW, 2011). Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari kenyataan ini: 1) Bahwa penegakan hukum dalam masalah perpajakan di Indonesia ternyata masih sangat lemah, dan 2) Dalam interaksi antara wajib pajak besar dan aparat perpajakan yang sangat strategis bagi penerimaan negara, kepentingan sempit ternyata masih sangat mengemuka sedangkan kepentingan publik lebih sering diabaikan (Kumorotomo, 2012).

Dari sisi pengeluaran anggaran, kasus korupsi juga menduduki sebab utama mengapa anggaran tidak dapat menghasilkan layanan publik yang berkualitas. Korupsi buku ajar, dana infrastruktur daerah, dana alokasi khusus, adalah diantara anggaran APBN yang marak dikorupsi. Kepolisian Republik Indonesia pada 2010 menangani 585 perkara meningkat menjadi 1.323 perkara pada tahun 2011. Jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2010 sekitar Rp 560,348 miliar meningkat 258,39 persen menjadi Rp. 2,007 triliun (<http://www.republika.co.id>, 30 Desember 2011).

Data lain dari Laporan ICW menunjukkan terdapat tiga besar sektor yang paling merugikan negara akibat korupsi. Pertama, sektor investasi pemerintah, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 439 miliar. Kedua, sektor keuangan daerah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 417,4 miliar. Ketiga, sektor sosial kemasyarakatan, yakni korupsi yang kasusnya berkaitan dengan dana-dana bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat, yang diperkirakan mencapai Rp 299 miliar.

Kerugian negara tertinggi berdasarkan tempat terjadinya korupsi atau berdasarkan lembaga yakni berasal dari semua lembaga dalam jajaran pemerintah kabupaten (pemkab) dengan jumlah 264 kasus. Selanjutnya, kelembagaan dalam naungan pemerintah kota (pemkot) dengan jumlah 56 kasus, dan terakhir dalam jajaran pemerintah provinsi (pemprov) dengan jumlah 23 kasus. Kerugian negara akibat korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten mencapai Rp 657,7 miliar, lembaga BUMN Rp 249,4 miliar, dan pemerintah kota Rp 88,1 miliar (<http://nasional.kompas.com>).

Dari kompleksitas permasalahan anggaran tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa anggaran memiliki kompleksitas permasalahan yang tinggi.

Anggaran memiliki masalah sistemik di dalam proporsi alokasi yaitu seperti anggaran publik belum mampu menyejahterakan masyarakat secara optimal. Selanjutnya proporsi belanja yang dihabiskan untuk biaya operasional birokrasi pemerintah semakin besar jika dibandingkan belanja modal yang langsung terkait dengan upaya peningkatan kemakmuran rakyat. Kecilnya belanja modal ini menunjukkan bahwa anggaran publik masih berorientasi kepada kepentingan birokrasi, bukan pada pelayanan publik. Korupsi anggaran Negara juga masih banyak terjadi.

### **Penutup**

Dari aspek kebijakan, anggaran publik di Indonesia belum mencerminkan wujud dari kepentingan publik. Masih banyak kepentingan yang mengintervensi bahkan mengorupsi proses dan konfigurasi anggaran baik secara politis maupun birokratis. Kebijakan anggaran publik juga ternyata masih berseberangan dengan bertentangan dengan azas demokrasi substantif bahwa *'public policy must be based on public consent'*. Ketika bicara public consent maka semestinya anggaran publik harus mengakomodasi kepentingan publik yang berorientasi pada pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Dalam kenyataannya, kebijakan anggaran publik di Indonesia belum mencerminkan *"budgets reflect choices and priorities"*. *Yaitu bahwa seharusnya anggaran menunjukkan pilihan kebijakan dan sekaligus prioritas pemerintah.* Untuk itu kontrol terhadap aspirasi masyarakat dalam anggaran, menekan potensi korupsi anggaran sejak perencanaan, dan integritas baik perencana, pelaksana maupun para pemangku kepentingan anggaran mutlak diperlukan.

### **Lesson learned bagi Lulusan Universitas Tri Dharma**

Menjadi seorang sarjana, bukan hanya sebuah gelar yang mengikuti sebuah nama tanpa makna. Sarjana adalah gelar yang layak disandang oleh seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan eksistensi keilmuan, wawasan, perilaku, sikap, serta moral yang secara implisit maupun eksplisit dikandung oleh sebutan gelar kesarjanaan. *The Meaning of being a Scholar* menunjukkan bahwa kesarjanaan lahir dari sebuah proses *transfer of knowledge, skill and attitude*, dalam lingkungan *social entity*, yang pada

akhirnya diharapkan membentuk dan dapat melahirkan para *scholar* yang memiliki kualifikasi, kompetensi serta integritas moral yang menjadi identitas kesarjanaannya .

Gelar kesarjanaan yang diraih dalam tahapan Pendidikan Tinggi Strata-1, S-2, maupun S-3, diperoleh dengan kerja keras, usaha dan upaya, disertai pengorbanan waktu, tenaga dan biaya, diyakini bukan merupakan tujuan akhir para alumni. Lebih dari itu, pencapaian derajat kesarjanaan ini lebih merupakan jembatan yang akan mengantarkan para wisudawan-wisudawati menapaki tahapan berikutnya.

Pencapaian tahapan harapan berikutnya yang ingin dicapai para sarjana baru, merupakan episode *the struggle for life*, yang mensyaratkan para sarjana baru mampu berkarya, berinovasi, dan eksis dalam situasi sesulit apapun. Seperti ketika menghadapi situasi kebijakan anggaran yang dilematis sekaligus problematis, perguruan tinggi dan alumni diharapkan mampu memberi solusi bagi masyarakat. Secara moral, perguruan tinggi dan para alumninya memiliki tanggungjawab akademik, tanggungjawab ilmiah, dan tanggungjawab professional untuk terus kritis, semangat berinovasi, dan bertindak serta berperilaku sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Aronson, Richard J, *Public Finance* , 1985. McGraw-Hill Book Company.  
Jones, C. O, 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Third Edition. Wadsworth, Inc. California.  
Kumorotomo, Wahyudi, 2012. Kepentingan Publik yang dikorbankan?  
Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.  
Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave ,1989. *Public Finance in Theory and Practice*, 5th ed., New York: McGraw-Hill.  
Peter van der Knaap, *Performance management and policy evaluation in the Netherlands: towards and integrated approach*, Ministry of Finance, The Hague  
Rubin, Irene, S. 2000. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Chatham, NJ: Chatham House,.  
Sabatier, Paul A. (Ed.) 2007. *Theories of the Policy Process* (Second Edition). Westview Press.  
Sen, Amartya K.,1997. *On Economic Inequality, Expanded edition with a substantial annexe* by James E. Foster and Amartya Sen, Oxford: Clarendon Press.  
*Pemerintah Akui Pertumbuhan Ekonomi Belum Berkualitas* , dalam <http://www.analisadaily.com>. Jumat, 07 Sep 2012 00:07 WIB.

*Sinergi Pengembangan Wilayah, Tinjauan Ekonomi dan Keuangan*, dalam [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)

*Tiga Besar Sektor yang Rugikan Negara akibat Korupsi*, 5 Februari 2012, dalam <http://nasional.kompas.com>

*Jumlah Kasus Korupsi Meningkat*, Jumat, 30 Desember 2011, dalam <http://www.republika.co.id>

*Nota Keuangan dan RAPBN 2013.*

[www.ti.or.id](http://www.ti.or.id)